BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia Merupakan Negara berkembang yang mengalami banyak kemajuan di segala bidang untuk menjamin kesejahteraan masyarakat. Mewujudkan pemerataan pembangunan Nasional bukanlah suatu hal yang mudah karena setiap daerah di Indonesia mempunyai letak geografis, jumlah penduduk, adat istiadat dan potensi sumber daya alam yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pemerintah memberikan kewenangan kepada setiap daerah untuk mengatur dan mengurus urusan daerahnya.berkontribusi terhadap peningkatan pembangunan di seluruh Indonesia. Keberhasilan melaksanakan kegiatan pembangunan tentu memerlukan dana yang tidak sedikit.Pemerintah menjadikan sektor pajak sebagai sumber penerimaan Negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan Nasional.

Sektor Pajak merupakan sumber Pendapatan utama Negara yang sangat penting. Uang yang terkumpul dari pajak digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan Negara, seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan program kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain,Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang berasal dari rakyat yang bertujuan untuk meningkatkan Pembangunan Nasional dan kesejahteraan masyarakat. Peran pajak dalam pembangunan perekonomian suatu Negara sangatlah penting, karena berfungsi seperti yang diharapkan dan memperbaikinya. Untuk memaksimalkan penerimaan pajak, diperlukan sistem pemungutan yang efektif untuk mengurangi jumlah wajib pajak yang tidak patuh.

Penerimaan pajak dapat berasal dari pajak yang dikelola oleh Provinsi maupun oleh Kabupaten/Kota terutama yang ada di Sumatera Barat. Kesadaran kepatuhan pajak dapat timbul apabila bersifat wajib Pajak tidak termasuk tunggakan kewajiban pajak atau jumlah denda administrasi yang ada. Untuk menarik minat wajib pajak dan meringankan beban wajib pajak, Gubernur Sumatera Barat menerbitkan Peraturan Gubernur No. 60/2020 tersambung Insentif. Insentif tersebut antara lain penghapusan denda keterlambatan pajak kendaraan bermotor, penghapusan denda penggantian hak kendaraan bermotor (BBNKB). Lalu, penghapusan denda jasa asuransi raharja (SWDKLLJ), dan juga pembebasan bea ganti nama kendaraan bermotor (BBNKB) bernomor BA dan nomor polisi non Sumbar atau non BA.

Pendapatan pajak daerah Kota Padang diperoleh melalui pajak kendaraan bermotor. Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan peraturan yang diatur dalam Undang-Undang Nomer 28 Tahun 2009. Pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas hak kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor. Pajak dibebankan kepada orang pribadi atau badan yang memiliki dan menguasai kendaraan bermotor. Peran pajak kendaraan bermotor sebagai bagian dari pajak daerah yang sangat penting bagi pendapatan asli daerah, sehingga pemerintah terus memaksimalkan penerimaan pajak. Peningkatan pajak kendaraan bermotor menjadi penting sejalan dengan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor. Dilihat dari realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) di Kota Padang seperti berikut:

Tabel 1. 1
Target dan Realisasi Penerimaan PKB di SAMSAT Kota Padang

Tahun	Pokok PKB		Persentase (%)
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
2019	305.927.859.000	334.185.142.800	109%
2020	294.905.826.000	280.148.820.850	95%
2021	299.864.529.900	276.494.832.000	108%
2022	306.942.519.100	298.845.411.150	97%
2023	458.465.347.800	463.145.522.950	95%

Sumber: Kantor Bapenda Padang

Tabel tersebut menunjukkan realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor pada tahun 2019 sampai 2023. Namun realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor di Badan Pendapatan daerah (BAPENDA) Kota Padang mengalami fluktuasi di tahun 2019 dan 2021 penerimaan PKB mencapai target realisasi. Pada tahun 2020 dan 2022 penerimaan PKB mengalami penurunan sebesar Rp280.148.820.850 dan Rp298.845.411.150. Realisasi Penerimaan PKB pada tahun 2023 mengalami penurunan dengan presentase 95%. Hal ini mengindikasikan masih rendahnya kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor untuk melakukan pembayaran kewajibannya dan terdapat kecenderungan pemerintah merendahkan target penerimaan dalam upaya menstabilkan capaian target. Salah satu cara untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah dengan menerapkan Sanksi Perpajakan yang mewajibkan setiap individu untuk membayar pajak sesuai dengan kewajiban Mereka. meningkatkan kesadaran wajib pajak, pemerintah perlu aktif memberikan edukasi mengenai hak dan kewajiban perpajakan, serta menjelaskan bahwa kesadaran yang baik dapat berdampak positif dan signifikan pada kepatuhan pajak kendaraan bermotor. yaitu dimana

wajib pajak kendaraan bermotor dapat memenuhi kewajibannya dengan baik dan tepat sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Kepatuhan wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya dengan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak meliputi pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, membayar pajak tepat waktu, dan memastikan wajib pajak telah memenuhi persyaratan pembayaran pajak serta mengetahui pembayaran yang ditentukan. Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai upaya yang dilakukan secara sadar oleh wajib pajak untuk memastikan mereka memenuhi semua kewajiban dan hak perpajakan yang berlaku. Ini mencakup tindakan sukarela individu atau badan dalam melaporkan dan membayar pajak dengan benar serta tidak mengabaikannya. Pemenuhan kewajiban perpajakan menjadi isu utama baik di negara maju maupun berkembang. Ketidakepatuhan dalam menyelesaikan kewajiban perpajakan dapat menyebabkan masalah seperti penghindaran dan penggelapan pajak. (Sasmita & Sa'adah, 2023). Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak salah satunya adalah Program Pemutihan Pajak.

Pemutihan pajak adalah penghapusan denda administrasi untuk pemilik kendaraan yang terlambat membayar pajak kendaraan bermotor. Untuk meningkatkan kepatuhan pajak kendaraan, pemerintah meluncurkan program pemutihan ini sebagai langkah untuk mendorong wajib pajak menyelesaikan tunggakan mereka tanpa dikenakan denda. Program pemutihan pajak kendaraan bermotor bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dan memberikan dampak positif. Pemutihan, yang biasa dikenal

masyarakat sebagai pembebasan sanksi administratif, adalah penghapusan denda terkait keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Pelaksanaan pemutihan pajak kendaraan bermotor berdampak pada menarik minat masyarakat yang tidak patuh untuk membayar pajak, sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak kendaraan. Program ini memberikan manfaat positif bagi masyarakat, karena memungkinkan mereka melunasi tunggakan pajak kendaraan hanya dengan membayar pokoknya, tanpa denda atau bunga. (Widya Sasana et al., 2021) Faktor lain yang diduga juga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu adanya Program Pembebasan bea balik nama.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) merupakan pajak yang dikenakan atas pengalihan kepemilikan kendaraan bermotor. Pengalihan ini dapat terjadi akibat perjanjian antara dua pihak, tindakan sepihak, atau kondisi tertentu seperti jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau penyertaan ke dalam badan usaha. Proses balik nama ini berarti mengubah status kepemilikan kendaraan dari pemilik sebelumnya (penjual) ke pemilik baru (pembeli). (Ammy, 2022). Menurut Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2017, pasal 2 ayat (4), pembebasan ini diberikan oleh gubernur untuk pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II, baik untuk kendaraan bermotor di dalam maupun luar provinsi. Dengan demikian, kendaraan yang dimutasikan selama periode pembebasan hanya dikenakan pajak kendaraan bermotornya. Kebijakan ini diperkirakan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan, mengingat tingginya permintaan terhadap kendaraan bermotor yang berdampak pada daya beli yang besar, serta tingginya kemungkinan transaksi jual beli kendaraan oleh wajib pajak. Pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor mengacu pada kebijakan yang mengharuskan kendaraan bermotor yang

dipindahkan ke dalam dan luar provinsi hanya dikenakan pajak pokok kendaraan bermotor. Tujuannya adalah untuk memberikan keringanan kepada wajib pajak dalam proses balik nama kendaraan akibat perubahan identitas pemilik dan untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Selain Program pembebasan bea balik Nama, Sanksi Perpajakan diduga juga menjadi faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Sanksi Perpajakan merupakan salah satu faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, karena pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat agar menaati aturan yang telah ditetapkan. Sanksi pajak berfungsi sebagai jaminan bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi dan ditaati. Dengan kata lain, sanksi perpajakan bertujuan mencegah wajib pajak melanggar ketentuan perpajakan. Indikator dari sanksi pajak ini adalah pentingnya sanksi untuk membentuk kedisiplinan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, yang perlu ditegakkan dengan tegas terhadap semua pelanggaran. Terdapat dua jenis sanksi yaitu sanksi administrasi, berupa kewajiban membayar kerugian kepada negara, khususnya dalam bentuk bunga dan kenaikan. Sanksi pidana, yaitu sanksi hukum yang diterapkan oleh otoritas pajak agar ketentuan perpajakan dapat dipatuhi. Sanksi perpajakan menjadi salah satu sarana penting untuk mendidik para pelanggar agar tidak mengabaikan peraturan perpajakan. Ketika terdapat sanksi yang tegas terhadap ketidakpatuhan dalam membayar pajak, maka individu cenderung lebih patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Penegakan hukum dalam perpajakan kendaraan bermotor melibatkan penerapan sanksi administratif terhadap wajib pajak yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu. **(Sulistyawati & Merkusiwati, 2024).**

Berdasarkan fenomena Program pemutihan dan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor di Samsat Kota Padang berpotensi membawa dampak yang signifikan. Di satu sisi, program ini dapat meningkatkan pendapatan daerah, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dan menertibkan administrasi kendaraan. Namun, di sisi lain, program ini juga dapat memicu lonjakan pengunjung di Samsat sehingga berpotensi menimbulkan antrian panjang. Selain itu, ada risiko penyalahgunaan program oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Untuk memastikan keberhasilan program, diperlukan sosialisasi yang masif, peningkatan kapasitas Samsat, penegakan hukum yang tegas, serta evaluasi berkala. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan program ini dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemerintah daerah.

Berdasarkan latar Belakang yang telah diuraikan diatas, Peneliti Ingin Melakukan penelitian mengenai Beberapa Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak Dalam bentuk Judul **“Pengaruh Program Pemutihan dan Pembebasan Bea Balik Nama Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Intervening Pada Samsat Kota Padang.”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan Latar belakang yang di atas dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Program Pemutihan Pajak dalam Meningkatkan kepatuhan wajib pajak Kendaraan Bermotor.
2. Pembebasan Bea Balik Nama Pajak kendaraan bermotor dalam Meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
3. Kurangnya Kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak.

4. Sanksi perpajakan tidak berjalan sebagaimana mestinya.
5. Meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan Program Pemutihan dan Pembebasan Bea Balik Nama.
6. Banyaknya wajib pajak yang menganggap sanksi perpajakan tidak berpengaruh sehingga wajib pajak berani menunda pembayaran pajak.
7. kurangnya pengetahuan wajib pajak mengenai peraturan perpajakan.
8. Rendahnya Pendidikan seorang wajib pajak sehingga berpengaruh terhadap pembayaran pajak.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dalam skripsi ini, agar tercapai sasaran dan tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan maka di dalam penulisan skripsi ini, penulis berfokus pada permasalahan yang ada yaitu membahas Pengaruh Program Pemutihan dan Pembebasan Bea Balik Nama Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Intervening Pada Samsat Kota Padang.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah program pemutihan pajak berpengaruh terhadap Sanksi Perpajakan Pada Samsat Kota Padang?
2. Apakah Program Pembebasan bea balik nama berpengaruh Terhadap Sanksi Perpajakan Pada Samsat Kota Padang ?

3. Apakah Program Pemutihan berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak Pada Samsat Kota Padang?
4. Apakah Pembebasan Bea Balik Nama berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak Pada Samsat Kota Padang?
5. Apakah Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak Pada Samsat Kota Padang?
6. Apakah Program Pemutihan berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak Melalui Sanksi Perpajakan sebagai variabel intervening Pada Samsat Kota Padang?
7. Apakah Pembebasan Bea Balik Nama berpengaruh terhadap Kepatuhan wajib pajak Melalui Sanksi Perpajakan sebagai variabel intervening Pada Samsat kota Padang?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh program pemutihan pajak terhadap Sanksi Perpajakan Pada Samsat Kota Padang.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pembebasan bea balik nama terhadap Sanksi Perpajakan Pada Samsat Kota padang.
3. Untuk menguji dan Menganalisis pengaruh program pemutihan terhadap Kepatuhan wajib pajak Pada samsat Kota Padang.
4. Untuk menguji dan Menganalisis pengaruh pembebasan Bea balik nama Terhadap Kepatuhan wajib pajak Pada Samsat Kota Padang.

5. Untuk menguji dan Menganalisis pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan wajib pajak Pada Samsat Kota Padang.
6. Untuk menguji dan Menganalisis pengaruh Program pemutihan terhadap Kepatuhan wajib pajak melalui Sanksi Perpajakan sebagai variabel intervening Pada samsat Kota Padang.
7. Untuk menguji dan Menganalisis pengaruh Pembebasan bea balik nama terhadap Kepatuhan wajib pajak melalui Sanksi Perpajakan sebagai variabel intervening Pada Samsat Kota Padang.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Manfaat dari penelitian ini bagi penulis dapat menambah dan memperluas pengetahuan khususnya dalam ilmu akuntansi perpajakan serta dapat melihat dan memahami bagaimana Program pemutihan dan pembebasan bea balik nama terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan Sanksi Perpajakan sebagai Variabel Intervening Pada Samsat Kota Padang.

2. Bagi Pemerintah

Dapat digunakan sebagai bahan untuk menjadi referensi, dan informasi serta dijadikan sebagai bahan perbandingan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian dengan objek penelitian yang sama dimasa yang akan datang.

3. Bagi Akademik

Dapat digunakan sebagai sarana dalam menambah wawasan dan pengetahuan mengenai Program pemutihan dan pembebasan bea balik Nama Terhadap Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan Sanksi Perpajakan sebagai variabel Intervening Pada Samsat Kota Padang.

4. Bagi Pembaca

Manfaat dari penelitian ini bagi pembaca dapat digunakan sebagai referensi untuk melakukan penelitian lanjutan dan sebagai bahan bacaan yang bermanfaat untuk pembaca.